

## **Pengembangan Mindset Akuntansi Perkoperasian Bagi Koperasi Paguyuban Karyawan (Pakar) DEKABE Jawa Timur**

**Kadek Pranetha Prananjaya<sup>1</sup>**

STIE Perbanas Surabaya, kadek@perbanas.ac.id

**Supriyati<sup>2</sup>**

STIE Perbanas Surabaya, supriyati@perbanas.ac.id

### **Abstrak**

Koperasi karyawan DEKABE Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya telah didirikan tahun 2017. Pengurus dan pengawas koperasi berasal dari karyawan PT. Duta Karya Bersatu (DEKABE) Surabaya. Unit usaha yang dijalankan koperasi hanya dagang kebutuhan pokok dan simpan pinjam. Sejak didirikan dua tahun lalu, koperasi belum menyusun laporan keuangan perkoperasian karena adanya keterbatasan kemampuan sumberdaya manusianya dan belum berjalannya operasional usaha secara sempurna. Pengurus dan pengawas juga bekerja paruh waktu pada koperasi. Pengurus dan pengawas sebagian besar berpendidikan sarjana akuntansi, namun terkait dengan akuntansi koperasi mereka masih memiliki pemahaman yang dan kemampuan yang komprehensif. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan mampu mengubah mindset pengurus dan pengawas bahwa koperasi bukan sekedar kumpulan karyawan saja, namun koperasi mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat lainnya. Karena itu, koperasi harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada anggota melalui penyusunan laporan keuangan perkoperasian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan antara lain, (1) penyelenggaraan pelatihan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, (2) pendampingan usaha atau operasional rutin koperasi, (3) dan penyusunan panduan praktis penyusunan laporan keuangan perkoperasian. Adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan ini mampu membantu operasional usaha koperasi. Output kegiatan ini berupa tersusunnya buku panduan praktis koperasi, tersusunnya catatan harian (buku kas, buku penjualan, buku piutang), tersusunnya draft laporan keuangan koperasi.

Kata kunci : Akuntansi Perkoperasian, Pelatihan, Pendampingan, Penyusunan Laporan keuangan

### **Abstract**

*The East Java DEKABE employee cooperative which was established in Surabaya was established in 2017. The management and supervisors of the cooperative come from the employees of PT. Duta Karya Bersatu (DEKABE) Surabaya. Business units run by cooperatives only trade in basic necessities and savings and loans. Since it was founded two years ago, the cooperative has not compiled the financial statements of cooperatives due to limited human resource capabilities and the not yet fully operational business operations.*

*Managers and supervisors also work part time at cooperatives. Managers and supervisors are mostly educated undergraduate accounting, but related to cooperative accounting they still have a comprehensive understanding and ability. The aim of community service is expected to be able to change the mindset of management and supervisors that cooperatives are not just a collection of employees, but cooperatives are able to contribute to the welfare of employees and other communities. Therefore, cooperatives must be accountable for their management to members through the preparation of cooperative financial statements. Implementation of community service activities that have been carried out include, (1) organizing training in recording and compiling financial reports, (2) assisting business or routine operational cooperatives, (3) and preparing practical guidelines for preparing financial statements for cooperatives. The existence of training and assistance activities is able to help the cooperative business operations. The output of this activity is in the form of a cooperative practical guidebook, a daily journal (cash book, sales book, accounts receivable book), a cooperative financial statement draft.*

*Keywords : Cooperative Accounting, Training, Mentoring, Preparation of Financial Statements*

### **Pendahuluan**

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (RI, 1995). Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Jika dilihat dari definisi dan prinsip-prinsipnya, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

Koperasi memiliki peran yang tidak akan terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan adil. Agar peran tersebut dapat tercapai, alangkah lebih baiknya koperasi dikelola dengan benar dan profesional apalagi tingkat perkembangan koperasi pada saat ini sudah mulai berkembang pesat. Semakin berkembangnya jumlah koperasi dan kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut

adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Menurut Narsa dan Isnalita (2017) koperasi akan dikatakan sehat apabila koperasi mampu melakukan pengelolaan yang baik dalam semua bidang termasuk dalam bidang keuangan.

Perlu diketahui juga bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1997 menjelaskan bahwa mewajibkan perusahaan yang berbadan hukum membuat suatu catatan yang merupakan laporan keuangan tidak terkecuali koperasi yang diwajibkan dalam membuat laporan keuangan. Koperasi diwajibkan untuk membuat laporan keuangan karena koperasi berhubungan dengan berbagai macam pihak. berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop) Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi pada bagian Bab III mengenai Laporan Keuangan dijelaskan bahwa pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas, serta stakeholder lain seperti pemerintah, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan (Jati Hironnymus, 2004; Indonesia, 2012).

Pada awalnya perkembangan koperasi di dalam melaporkan laporan keuangannya, kini dalam penyusunannya telah dikeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang telah mendapat revisi pada tahun 1998 dan dimana pada tanggal 17 Juli 2009 meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mulai efektif per 1 Januari 2011. Laporan keuangan dalam SAK ETAP menyajikan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2009; Indonesia, 2012; IAI, 2016).

Data koperasi di Provinsi Jawa Timur menurut Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki populasi koperasi terbesar yaitu sebesar 31.690 unit dengan rincian koperasi aktif sebesar 27.304 dan yang tidak aktif 4.386. Salah satu arah kebijakan umum dan Program tersebut merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing instansi dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaannya, yaitu Strategi Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing global (Sugianto, 2002; Indonesia, 2011).

Koperasi Pakar DEKABE ini telah berdiri kurang lebih tiga tahun yang lalu. Koperasi Pakar DEKABE ini beralamatkan di Jl. Manyar Kertoarjo III No 52 Surabaya dengan anggota kurang lebih sekitar 85 orang. Kepengurusan koperasi ini terdiri dari ketua sekretaris, bendahara dan pengawas. Koperasi Pakar DEKABE ini terdiri dari dua jenis koperasi yaitu koperasi dagang dan simpan pinjam. Selama ini dalam kegiatan operasi koperasi ini dijalankan oleh seorang manajer koperasi yang menangani unit simpan pinjam dan toko. Pengurus koperasi selama dua tahun ini belum pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dan belum pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga koperasi ini tidak pernah membagikan Sisa Hasil Usaha. Hal ini akan berakibat bahwa Koperasi Pakar DEKABE tidak akan mengetahui bagaimana kinerja koperasi ini karena laporan

keuangan tidak tersaji secara lengkap dan rapi bahkan di dalam toko selalu sering terjadi selisih persediaan barang dagangan. Permasalahan ini timbul karena kurangnya kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia yang mengelola koperasi Pakar DEKABE. Hal ini akan berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan koperasi dan keberlanjutan usahanya. Kondisi ini tentu berakibat keberlanjutan usaha masih diragukan, apalagi secara legalitas keberadaan koperasi menjadi risiko di masa datang. Maka akan lebih efektif jika perubahan mindset akuntansi perkoperasian ini dilakukan melalui pendampingan pada operasionalnya.

### **1. Tujuan kegiatan**

- a. Memberikan pengetahuan kepada pengelola koperasi Pakar DEKABE mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi operasional koperasi
- b. Mengubah cara pandang pengelola koperasi Pakar DEKABE tentang pencatatan dan pelaporan akuntansi agar mereka memahami manfaat akuntansi perkoperasian di masa datang

### **2. Manfaat kegiatan**

- a. Diharapkan para pengelola koperasi Pakar DEKABE dapat mengimplementasikan pencatatan akuntansi dalam operasional hariannya
- b. Diharapkan pengelola koperasi Pakar DEKABE mampu menyusun laporan keuangan koperasi yang akan digunakan dalam pertanggungjawaban pengurus dan pengawas
- c. Diharapkan pengelola koperasi Pakar DEKABE mampu mengembangkan koperasi ini menjadi lebih baik dan dapat mencari alternatif pendanaan di luar anggota seiring perkembangan koperasi

### **3. Kajian Pustaka**

#### Peran Akuntansi Bagi UMKM

Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana tertuang dalam Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menunjukkan bahwa UMKM terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. UMKM yang tergolong usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini. UMKM yang tergolong usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. UMKM yang tergolong usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi secara global termasuk di Indonesia tahun 1998 berakibat banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membiayai operasional rutinnya. Perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dan akibatnya banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan pada operasional UMKM karena masih sedikit UMKM yang memperoleh pendanaan berasal dari luar negeri dan tidak terpengaruh oleh adanya inflasi atau penurunan nilai tukar mata uang asing (Wahdini., 2006; Supriyati & Wulanditya, 2012).

Kondisi UMKM hingga saat ini belum mengalami perubahan. Kesulitan utama yang banyak dihadapi UMKM adalah terbatasnya permodalan usaha dan ketidakmampuan tenaga kerjanya. Sumber permodalan UMKM sebagian besar berasal dari modal sendiri sehingga ketika perusahaan mengalami perkembangan pesat, maka modal sendiri sudah terbatas. Demikian dengan kemampuan tenaga kerjanya, UMKM masih memiliki keterbatasan dalam penggajian pegawai dengan standar kompetensi tertentu.

#### Standar Akuntansi Keuangan ETAP

Ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah sesuai dengan judulnya yaitu dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam SAK ETAP paragraf 1.1 (IAI, 2009; IAI, 2016) mengungkapkan yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP berlaku efektif per 1 Januari 2011, seperti yang diungkapkan dalam paragraph 30.1 (IAI, 2009). Namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP, kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Bagi UMKM, penerapan SAK ETAP memberikan banyak keuntungan antara lain kemudahan penyusunan laporan keuangan, kemungkinan mendapat pinjaman yang lebih besar, dapat digunakan dalam beberapa tahun kedepan. Penyederhanaan PSAK yang dilakukan oleh SAK ETAP sangatlah memudahkan pemilik UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah tersusun akan memudahkan proses audit sekaligus mendapat opini audit. Hal ini akan

memudahkan pemilik UMKM untuk mendapat pinjaman dari pihak eksternal (bank atau perusahaan finansial lainnya)

## Peran Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 7 menyebutkan bahwa untuk mendirikan koperasi paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal koperasi. Bila melihat jumlah anggota kelompok tani tambak dan kelompok usaha, maka dapat dipenuhinya persyaratan pendirian koperasi.

Sugianto (2002) menyatakan untuk mengukur keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari menghasilkan SHU, tetapi juga kemampuan mempromosikan ekonomi anggotanya (*benefit economic*). Ropke (2003) menyatakan bahwa koperasi akan sangat menarik bila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya melalui partisipasi anggota. Selain itu, koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat akan banyak terbantu dalam pencarian sumber permodalan usaha mereka. Semakin kuat sumber permodalan dalam sebuah usaha tentunya keberlanjutan usahanya akan semakin dapat dipertahankan.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan pendampingan mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi perkoperasian. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan diskusi dengan pengelola koperasi Pakar DEKABE. Peneliti melakukan pendampingan dalam operasional koperasi agar pemahaman pengelola semakin baik dan diharapkan dapat diterapkan selanjutnya. Adapun data sekunder didapatkan dari arsip, dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

Koperasi karyawan DEKABE telah mengangkat 5 orang pegawai sebagai pengurus dan 1 orang pegawai sebagai pengawas. Pengurus koperasi bekerja secara paruh waktu pada koperasi dan untuk operasional hariannya belum mampu memperkerjakan pegawai di koperasi karena keterbatasan modal koperasi. Sejak berdirinya dua tahun lalu, koperasi karyawan DEKABE belum menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Hal itu disebabkan ketidakmampuan pengurus menyusun laporan keuangan perkoperasian.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai tanggal 1 April 2019 dengan penyelenggaraan pelatihan perpajakan dan penyusunan laporan keuangan bagi koperasi tanggal 10 April 2019 yang dihadiri oleh pengurus atau manajer koperasi yang berkedudukan di Kotamadya Surabaya sebanyak 28 orang. Narasumber kegiatan selain dari tim pelaksana juga dari Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Timur 1 di Surabaya.



Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pengenalan proses bisnis koperasi  
Materi yang disampaikan mulai dari pengertian transaksi bisnis, ruang lingkup operasi koperasi, tujuan dan arah pengembangan koperasi di tengah perusahaan yang berorientasi profit. Juga disampaikan beberapa kebijakan koperasi misalkan jenis dan sumber permodalan, unit usaha, diversifikasi usaha.
2. Identifikasi transaksi dan akun dalam pelaporan keuangan  
Setelah diketahui proses bisnis koperasi, materi dilanjutkan dengan perancangan akun-akun pelaporak keuangan pada laporan keuangan perkoperasian nantinya. Tim pelaksana juga menjelaskan keterkaitan antara transaksi koperasi dan akun-akun laporan keuangan perkoperasian.
3. Pengenalan pajak bagi koperasi usaha  
Materi ini menyangkut aspek pajak bagi koperasi yang diatur pada PP 23 Tahun 2018 tentang PPh final 0,5% yang berlaku bagi usaha kecil dan menengah termasuk koperasi.
4. Proses penyusunan laporan keuangan perkoperasian.  
Materi yang disampaikan terdiri dari jenis-jenis laporan keuangan koperasi, manfaat laporan keuangan koperasi serta cara pencatatan mulai dari pencatatan ke dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo dan akhir.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam penyusunan laporan keuangan perkoperasian masih rendah sehingga adanya kegiatan tersebut mampu memotivasi dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus atau manajer koperasi. Sebanyak 80% peserta menginginkan untuk dilakukan pelatihan lanjutan atau pendampingan agar mereka mampu menyusun laporan keuangan perkoperasian secara tepat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan ke koperasi karyawan DEKABE yang berkedudukan di Perumahan Manyar Indah Surabaya. Hasil pengamatan lapangan

ditemukan bahwa koperasi telah melakukan pencatatan sederhana dalam bentuk excell terdiri dari:

1. Rekap penjualan
2. Rekap pembelian
3. Rekap penerimaan kas
4. Rekap pengeluaran kas.

Pengurus disela-sela kesibukannya dan keterbatasan kemampuannya mengerjakan rekap tersebut karena menurut pengurus walaupun koperasi masih kecil, namun proses bisnisnya berbeda dengan perusahaan komersial. Proses pendampingan ini juga melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa yang secara rutin setiap minggu melakukan pendampingan dengan pengurus koperasi.

Pendampingan yang dilakukan secara rutin diharapkan mampu mengubah pandangan pengurus dan pengawas bahwa proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan perkoperasian sangat penting untuk operasional dan keberlanjutan koperasi. Hasil pendampingan selama 1 (satu) bulan menunjukkan:

1. Adanya peningkatan motivasi menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi berbasis SAK ETA yang terbukti adanya komunikasi secara terus menerus antara pengurus dan tim pelaksana;
2. Terlaksananya proses pencatatan akuntansi perkoperasian berbasis microsoft excell sehingga tersusun laporan keuangan koperasi untuk tahun buku 2018 walaupun kondisi rugi dalam pelaporannya;
3. tersusunnya panduan praktis akuntansi koperasi yang dapat digunakan sebagai acuan pengurus dalam penerapan pencatatan dan penyajian laporan keuangan koperasi di masa datang.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Kegiatan pengabdian masyarakat di koperasi karyawan DEKABE Surabaya dapat disimpulkan bahwa motivasi untuk mengembangkan koperasi sangat besar. Keberadaan koperasi karyawan DEKABE tidak hanya sekedar kumpulan karyawan saja, namun diakui memberikan andil dan kontribusi besar bagi kesejahteraan karyawan. Pencatatan akuntansi secara sederhana telah dilakukan, namun belum sempurna dan belum lengkap sampai pada proses penyusunan laporan keuangan perkoperasian. Hal ini karena kesibukan dan keterbatasan kemampuan sumberdaya khususnya tidak ada pegawai yang terlibat rutin setiap harinya. Pengurus dan pengawas bekerja sambil disela-sela sebagai karyawan pada PT. Duta Karya Bersama. Akibat dari ini terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan perkoperasian dan belum terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan. Langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko dengan mengubah mindset tentang pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan perkoperasian melalui pelatihan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi pengurus atau manajer koperasi, pendampingan usaha pada koperasi karyawan DEKABE Surabaya serta menyusun buku panduan praktis akuntansi perkoperasian. Selanjutnya perlu dilakukan pemantauan operasional melalui mekanisme pengawasan rutin oleh pengawas



koperasi, diversifikasi produk guna meningkatkan omzet, pengembangan kompetensi pengurus melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan seminar/workshop/lokakarya/pelatihan.

### **Acknowledgements**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Juga, disampaikan kepada pemilik dan seluruh karyawan PT. Duta Karya Bersatu Surabaya yang berkontribusi memberikan kesempatan bagi tim pelaksana melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- IAI. (2009). *SAK: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- IAI. (2016). *SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Indonesia, K. N. K. dan U. R. (2012). *Koperasi Didorong Penuhi Standar Akuntansi. 2012*.
- Indonesia, K. N. K. dan U. R. (2011). *Laporan Tahunan 2011 "Kebangkitan Koperasi dan UMKM Menuju Kesejahteraan Rakyat."*
- Indonesia, K. N. K. dan U. R. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (2012).
- Jati Hironnymus, B. B. (2004). Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Usahawan*, 2(2), 210-218.
- RI. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Ropke, J. (2003). *Ekonomi Koperasi-Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto. (2002). Sistem Akuntansi Koperasi Berdasarkan PSAK No. 27 Untuk Menghasilkan Informasi Keuangan yang sesuai dengan Jati Diri Koperasi. *Jurnal Koperasi Indonesia*, XVII(1).
- Supriyati & Wulanditya. (2012). The SME Perception Toward The Accounting Standard Without Public Accountability (SAK ETAP) and Self Assessment System For Increasing Voluntary Tax Compliance. *International Journal of Business and Management*, 4(ISSN 2244-1808).
- Wahdini., S. (2006). Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.